



PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN

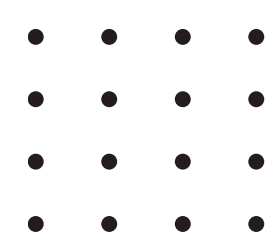
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA PARIAMAN TAHUN 2024



2024

BAGIAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025





KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dengan segala rahmat dan karunia-NYA, Pemerintah Kota Pariaman dapat menyusun dan menyelesaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024 ini adalah untuk memenuhi maksud pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Kota Pariaman sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini berisikan uraian capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan wajib pelayanan dasar, hasil EPPD dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah serta inovasi daerah.

Kesuksesan yang telah tercapai selama rentang waktu tersebut tidak terlepas dari motivasi dan kerja keras dari semua *stakeholder* baik legislatif, eksekutif maupun masyarakat yang terlibat langsung dan berpartisipasi aktif di segala lini demi terselenggaranya tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.



Diharapkan laporan ini bermanfaat bagi perbaikan kinerja pemerintahan pada tahun berikutnya serta dapat menjadi bahan Pemerintah Pusat dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada daerah umumnya dan Kota Pariaman khususnya serta dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk melakukan perbaikan menuju arah yang lebih baik sesuai dengan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Akhirnya, kami menyadari bahwa Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami membuka diri untuk menerima masukan dan saran atas isi laporan ini, dan akan menjadi bahan untuk kesempurnaan pembuatan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun berikutnya, terima kasih.

Pariaman, 26 Maret 2024

Wali Kota Pariaman,



Yola Balad



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Gambaran Umum Daerah	1
C. Kondisi Geografis	1
D. Gambaran Umum Demografis	4
E. Indikator Kinerja Makro	5
BAB II RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR	7
A. Pendidikan	8
B. Kesehatan	27
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47
D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....	51
E. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	54
F. Sosial	56
BAB III HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	59
A. Hasil EPPD	59
B. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	59
BAB IV REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH .	61
A. Penerimaan Daerah	62
B. Pengeluaran Daerah	64
BAB V INOVASI DAERAH	66
BAB VI PENUTUP	83



BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DAERAH

Kota Pariaman dulunya merupakan Kota Administratif, dan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Oktober 1987.

Dengan keluarnya Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat, maka status Kota Administratif Pariaman berubah menjadi Kota Pariaman yang secara kelembagaan telah berdiri sejajar dengan daerah kota lainnya di Indonesia.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kota Pariaman adalah satu dari 19 kab/kota di Sumatera Barat, daerah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman merupakan hamparan dataran rendah dengan luas 64,97 Km², berhawa panas dan memiliki panjang garis pantai 12,7 Km. Disamping daratan terdapat 4 (empat) pulau kecil non urban yakni Pulau Angso Duo, Pulau Kasiak, Pulau Tengah, dan Pulau Ujuang.

Kota Pariaman terletak antara 00^o 33' 00" - 00^o 40' 43" Lintang Selatan dan 100^o 04' 46" - 100^o 10' 55" Bujur Timur. Kota Pariaman terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, yakni Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur.

Kota Pariaman juga identik dengan Kota Pantai dimana seluruh Kecamatan di Kota Pariaman memiliki wilayah yang berbatasan dengan pantai kecuali Kecamatan Pariaman Timur. Rata-rata ketinggian wilayahnya berada pada kisaran 0-15 meter dari permukaan laut.

Disamping memiliki pantai yang indah, Kota Pariaman juga dilewati oleh 3 (tiga) sungai yaitu Batang Pariaman sepanjang 12 Km, Batang Manggung sepanjang 11,50 Km dan Batang Manggau sepanjang 11,80 Km.

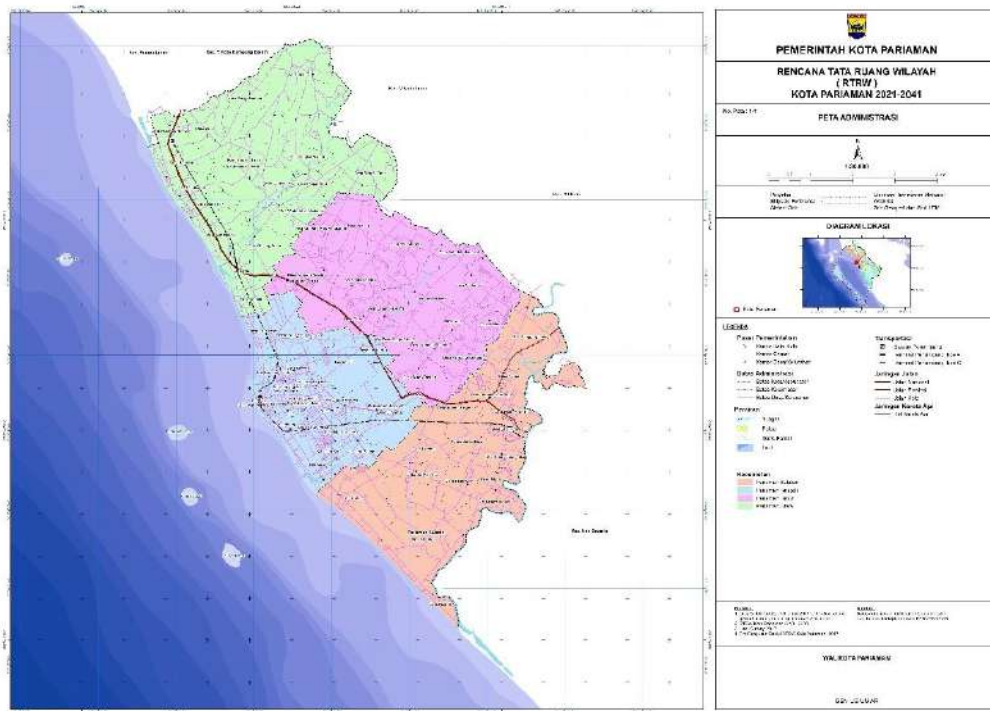
C. KONDISI GEOGRAFIS

1. Batas Administrasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomo 10 Tahun 2009, kecamatan di Kota Pariaman telah bertambah menjadi 4 (empat) kecamatan yakni : Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur.

Kota Pariaman secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan V Koto Timur (Kab. Padang Pariaman)
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Nan Sabaris (Kab. Padang Pariaman)
- c. Sebelah Timur : Kecamatan VII Koto Sungai Sarik (Kab. Padang Pariaman)
- d. Sebelah Barat : Samudra Indonesia



Peta Administrasi Kota Pariaman

2. Luas Wilayah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman sebagai salah satu Kota yang berada dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat mempunyai luas wilayah sebesar 73,36 Km² dan luas lautan 282,69 km², dengan panjang garis pantai 12,7 Km² yang mencakup 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan. Dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 10 Tahun 2009, kecamatan di Kota Pariaman telah bertambah menjadi 4 (empat) kecamatan yakni: Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022 -2042 pada tanggal 16 September 2022, Luas Wilayah Kota Pariaman yaitu 64,97 km.

3. Topografis

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang terletak di pantai barat Propinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter di atas permukaan laut dengan sedikit daerah perbukitan. Memiliki 4 (empat) pulau kecil non urban yakni Pulau Angso Duo, Pulau Kasiak, Pulau Tengah, dan Pulau Ujuang dengan panjang garis pantai lebih kurang 12,7 kilometer.

Karena terletak di tepi pantai pada umumnya merupakan hamparan dataran rendah yang landai. Kondisi topografi Kota Pariaman dapat dikelompokkan kepada jenis morfologi dataran dengan ketinggian antara 2 – 35 meter di atas permukaan laut dengan sedikit daerah perbukitan. Luas kemiringan lahan dapat dirinci pada tabel berikut ini.



Tabel 1.1
Kondisi Topografi Kota Pariaman

Kondisi Topografi	Luas (ha)	Persentase (%)
Datar (0-3%)	6.207	95,53%
Agak Landai (3-8%)	23	0,35%
Landai (8-15%)	48	0,74%
Agak Curam (15-25%)	25	0,39%
Curam (25- 40%)	194	2,99%
Jumlah	6.493	100,0%

Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2022-2042

4. Geologi

Seperti pada umumnya daerah lain yang berada di bagian pantai barat pulau Sumatera, Kota Pariaman memiliki jenis batuan resen dan tufa vulkan. Batuan induk penyusun adalah Aluvium serta Tuf Batu Apung dan Andesit (basal). Kota Pariaman secara geologis bersama dengan Kabupaten Padang Pariaman terletak pada dua jalur patahan lempeng dunia yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo – Australia dan topografi Padang Pariaman yang dilalui oleh banyak anak-anak sungai. Adapun jenis batuan yang terdapat di Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

1) Qal : Endapan Aluvial

Batuan Qal/endapan permukaan merupakan formasi geologi aluvium yang terdiri dari lanau, dan kerikil umumnya terdapat di daratan pantai, termasuk endapan rawa di sebelah utara tikau, sebelah Barat Daya Lubuk Alung dan sebelah Timur Padang.

2) Qpt : TUFT Batu apung dan andesit (basal).

Tuf batuapung umumnya terdiri dari serabut-serabut gelas dari 5 hingga 80% fragmen-fragmen batuapung putih (hampir tidak memiliki mineral-mineral mafik). Berukuran garis tengah 1 hingga 20 cm, agak kompak. Setempat terdapat lapisan-lapisan pasir yang kaya akan kuarsa, juga lapisan-lapisan kerikil yang terdiri dari komponen-komponen kuarsa, batuan gunung api dan batuan gamping. Setempat bongkahan-bongkahan obsidian dan pichstone berwarna kelabu kemerahan sampai kecoklatan baik yang masih segar maupun yang sudah lapuk. Endapan tuft ini mungkin berasal dari erupsi terakhir Kaldera Maninjau atau erupsi celah yang hubungannya dengan jalur sesar besar Sumatera (Westerveld, 1953). Hubungan di lapangan menunjukkan bahwa Qhpt terletak di atas Qpt.

Secara fisik butiran penyusun tanah/batuan yang terdapat di Kota Pariaman yaitu lima satuan: satuan pasir, satuan pasir lempung-lanauan, satuan pasir lempungan, satuan lempungan pasiran dan satuan lanau lempungan. Satuan butiran tanah pasir terdapat di kawasan pesisir. Satuan pasir lempungan terdapat pada dataran sementara satuan lanau lempungan terdapat pada daerah kearah timur. Satuan lempung pasiran terdapat di bagian utara di daerah Tungkal Utara dan Tungkal Selatan.



5. Klimatologi (Iklim)

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan pertahun mencapai angka sekitar 4.055 mm dengan lama hari hujan 198 hari. Suhu rata-rata 25,34°C, dengan kelembaban udara rata-rata 85,25 dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam.

Musim kemarau dan musim hujan selalu berubah-ubah menurut waktu. Iklim yang demikian memungkinkan untuk tumbuhnya berbagai jenis tanaman, akan tetapi curah hujan dan tingkat kelembaban yang tinggi yang menimbulkan berbagai permasalahan, misalnya tanaman yang membutuhkan iklim musim kemarau tidak dapat tumbuh dengan baik, merupakan kendala bagi penanganan pasca panen komoditas tertentu yang memerlukan cuaca panas dan cerah selama proses pengeringan, kendala dalam penyimpanan komoditas, berkurangnya jumlah hari kerja produktif dan pengaruhnya negatif terhadap sejumlah komoditas. Iklim juga sangat mempengaruhi besarnya tangkapan ikan bagi nelayan.

D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Pariaman pada tahun 2024 sebanyak 101.680 jiwa, mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 dengan jumlah penduduknya sebanyak 98.690 jiwa. Dengan komposisi penduduk untuk tahun 2024 sebanyak 51.267 jiwa penduduk laki-laki dan 50.413 jiwa penduduk perempuan.

2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia

Tabel 1.2. Penduduk Kota Pariaman menurut kelompok umur dan Jenis Kelamin

Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	4.082	3.767	7.849
5 – 9	4.575	4.127	8.702
10 – 14	4.728	4.465	9.193
15 – 19	4.501	4.110	8.611
20 – 24	4.720	4.465	9.185
25 – 29	4.552	4.153	8.705
30 – 34	3.728	3.427	7.155
35 – 39	3.798	3.577	7.375
40 – 44	3.614	3.367	6.981
45 – 49	3.189	3.020	6.209
50 – 54	2.612	2.747	5.359
55 – 59	2.400	2.551	4.951
60 – 64	1.813	2.104	3.917
65 – 69	1.347	1.753	3.100
70 – 74	823	1.143	1.966
>=75	785	1.637	2.422
Jumlah	51.267	50.413	101.680

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024



E. INDIKATOR KINERJA MAKRO

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pariaman pada tahun 2024 sebesar 80,49 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang besarnya 79,76. Pada level Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, angka IPM Kota Pariaman menduduki urutan ke-lima.

b. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan. Jumlah penduduk miskin di Kota Pariaman tahun 2024 sebanyak 4.010 orang dengan persentase sebesar 4,26%. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2023 sebanyak 3.910 dengan persentase 4,20%.

c. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada daerah yang bersangkutan, khususnya tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari : mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,32%, ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,68%.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman selama tahun 2024 tercatat sebesar 4,51 persen berada pada urutan ke tujuh jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya se Sumatera Barat. Angka ini diperoleh dari besarnya kenaikan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari 4.018,87 miliar rupiah pada tahun 2023 menjadi 4.200,8 miliar rupiah pada tahun 2024. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Pariaman pada tahun 2024 tercatat 6.801,89 miliar rupiah, nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun yang lalu dimana pada tahun 2023 yaitu sebesar 6.435,12 miliar rupiah.

Struktur perekonomian Kota Pariaman tahun 2024 menunjukkan 4 kategori lapangan usaha yang kontribusinya diatas 10 persen dalam pembentukan nilai tambah bruto. Secara berurutan masing-masing yaitu kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 17,38 persen, kedua kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,62 persen, dan yang ketiga kategori lapangan usaha konstruksi sebesar 15,18 persen, dan yang keempat dari sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,20 persen.

e. PDRB Per Kapita

PDRB Perkapita merupakan nilai nominal PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Artinya, nilai PDRB perkapita sangat tergantung pada besaran nilai PDRB dan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang bersangkutan. PDRB Perkapita merupakan pendekatan yang menunjukkan rata-rata pendapatan yang mungkin dinikmati oleh setiap penduduk suatu daerah selama satu tahun. Semakin tinggi PDRB Perkapita suatu daerah maka akan



menunjukkan semakin baiknya tingkat perekonomian daerah tersebut, meskipun ukuran ini tidak sepenuhnya dapat menggambarkan pendapatan antar penduduk secara riil dan merata. Penyebabnya keterbatasan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku ini untuk mendeteksi kondisi riil perekonomian masyarakat disebabkan beberapa hal diantaranya PDRB perkapita masih belum dapat mendeteksi kesenjangan penguasaan aset dan penerimaan balas jasa faktor produksi. Selanjutnya, PDRB Perkapita masih mengandung pengaruh tingkat kenaikan harga atau inflasi sehingga belum benar-benar menggambarkan daya beli masyarakat. Namun demikian, indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro. Pada tahun 2024 Pendapatan Perkapita Kota Pariaman sebesar 69,17 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 besarnya 66,20 persen.

f. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Gini Ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh. Gini Ratio didasarkan pada kurva Lorenz yang merupakan kurva 2 dimensi antara distribusi penduduk (persentase kumulatif penduduk) dan distribusi pengeluaran perkapita (persentase kumulatif pengeluaran perkapita). Nilai Gini ratio berkisar antara 0 dan 1. Jika $G < 0,3$ berarti memiliki ketimpangan yang rendah, $0,3 < G < 0,5$ berarti memiliki ketimpangan yang sedang dan jika $G > 0,5$ berarti memiliki ketimpangan yang tinggi. Pada tahun 2024 nilai gini rasio Kota Pariaman tercatat 0,281. Ini berarti Gini Ratio Kota Pariaman masih tergolong kategori Ketimpangan Rendah.



BAB II

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program disusun dalam pencapaian rencana pembangunan yang berdasarkan kepada misi dan visi yang telah ditetapkan. Program harus dapat menggambarkan kontribusi dari pelaksanaan roda pemerintahan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan.

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Dalam capaian pelaksanaan program dan kegiatan harus menekankan pentingnya akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan target kinerja dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja merupakan keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.



A. PENDIDIKAN

Urusan Pendidikan diselenggarakan Oleh Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pariaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 152.291.856.452,34,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 150.870.465.391,00 (99,07%), dengan uraian berikut:

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				116.473.967.652	114.086.211.212	97,95%
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	17.691.592	17.511.264	98,98%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	1 dok	100%	4.204.112	4.183.784	99,52%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dok	3 dok	100%	13.487.480	13.327.480	98,81%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				114.840.760.691	112.665.811.171	98,11%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bln	12 Bln	100%	114.632.382.691	112.463.533.171	98,11%
4	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bln	12 Bln	100%	208.378.000	157.900.000	97,07%
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah				277.776.929	263.144.502	94,73%
5	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	1.998.000	1.998.000	100%
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Unit	13 Unit	100%	94.100.000	87.563.100	93,05%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	37.732.92	37.432.929	99,20%
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100%	8.000.000	8.000.000	100%
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bln	12 bln	100%	135.946.000	128.150.473	94,27%
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.151.843.440	970.313.739	84,24%
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%	97.600.000	73.731.739	75,54%
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 Bulan	100%	1.054.243.440	896.582.000	85,05%
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				185.895.000	169.430.536	91,14%
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18 unit	18 unit	100%	152.120.000	135.785.430	89,26%
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	5 unit	100%	3.075.000	3.075.000	100,00%
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100%	30.700.000	30.570.106	99,58%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				30.959.597.007	25.674.308.868	82,93%
VI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				18.904.012.902	17.442.947.725	92,27%
15	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	100%	1.503.112.370	1.433.902.876	95,40%
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	50%	230.117.740	158.085.397	68,70%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

17	Pengadaan Mebel Sekolah	3 paket	3 paket	100	510.400.000	506.510.815	99,24%
18	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	594 siswa	594 siswa	100	640.878.782	604.968.790	94,40%
19	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 paket	1 paket	100	303.575.165	297.521.150	98,01%
20	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	228 orang	228 orang	100	2.140.607.787	1.760.850.000	82,26%
21	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1430 orang	800 orang	55,94%	386.887.008	229.111.250	59,22%
22	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	81 sekolah	81sekolah	100	9.917.243.000	9.205.375.400	92,82%
23	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3 paket	3 paket	50	707.724.690	700.256.544	98,94%
24	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	2 sekolah	2 sekolah	100%	365.610.000	363.745.127	99,49%
25	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	14 sekolah	14 sekolah	100%	2.197.856.360	2.182.620.376	99,31%
VII	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				4.788.745.079	1.704.816.422	35,60%
26	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1 sekolah	0 sekolah	-	373.575.467	-	0,00%
27	Pembangunan Laboratorium	1 sekolah	0 sekolah	-	833.530.000		0,00%
28	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 sekolah	1 sekolah	100%	419.400.000	414.983.324	98,95%
29	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	102 siswa	102 siswa	100%	166.170.348	155.188.348	93,39%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

30	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2 paket	1 paket	50%	143.850.000	30.000.000	20,86%
31	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	84 orang	84 orang	100%	803.988.943	769.700.000	95,74%
32	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	150 orang	100 orang	66,67%	139.676.106	15.036.000	10,76%
33	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9 sekolah	9 sekolah	100%	565.357.000	319.908.750	56,59%
34	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 sekolah	0 sekolah	-	1.343.197.215	-	0,00%
VIII	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				5.808.497.026	5.279.940.771	90,90%
35	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2 paket	2 paket	100%	422.059.000	198.818.884	47,11%
36	Pengadaan Mebel PAUD	1 paket	1 paket	100%	25.000.000	25.000.000	100,00%
37	Pengadaan Perlengkapan PAUD	6 sekolah	6 sekolah	100%	180.000.000	177.988.000	98,88%
38	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	50 orang	0 orang	-	15.000.000	-	0,00%
39	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 paket	1 paket	100%	48.000.000	47.132.200	98,19%
40	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	650 anak	650 anak	100%	261.775.316	247.500.000	94,55%
41	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	380 orang	380 orang	100%	2.319.970.210	2.208.050.000	95,18%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

42	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	93 lembaga	93 lembaga	100%	232.307.500	168.228.000	72,42%
43	Pengelolaan Dana BOP PAUD	93 lembaga	93 lembaga	100%	1.954.200.000	1.857.496.860	95,05%
44	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	93 lembaga	93 lembaga	100%	57.714.000	57.714.000	100,00%
45	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	1 sekolah	1 sekolah	100%	186.471.000	186.197.148	99,85%
46	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2 sekolah	2 sekolah	100%	106.000.000	105.815.679	99,83%
IX	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.458.342.000	1.246.603.950	85,48%
47	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	93 orang	0 orang	-	16.700.000	-	0,00%
48	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	30 orang	30 orang	100%	69.250.000	43.330.000	62,57%
49	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Non Formal/Kesetaraan	6 lembaga	6 lembaga	100%	112.500.000	78.950.000	70,18%
50	Pengelolaan Dana BOP Non Formal/Kesetaraan	6 lembaga	6 lembaga	100%	1.197.100.000	1.105.731.950	92,37%
51	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Non Formal/Kesetaraan	6 lembaga	6 lembaga	100%	9.748.000	9.748.000	100,00%
52	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	6 lembaga	6 lembaga	100%	53.044.000	8.844.000	16,67%
C	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan				13.009.000	3.906.000	30,03%
X	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				13.009.000	3.906.000	30,03%



55	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 lembaga	10 lembaga	100%	13.009.000	3.906.000	30,03%
D	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				221.803.950	198.071.250	89,30%
XI	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Labupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				85.000.000	74.750.000	87,94%
56	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	20 orang	20 orang	100%	10.000.000	10.000.000	100,00%
57	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	1 dokumen	1 dokumen	100%	75.000.000	64.750.000	86,33%
XII	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten Kota				136.803.950	123.321.250	90,14%
58	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	250 orang	250 orang	100%	136.803.950	123.321.250	90,14%
E	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				1.603.938.250	1.570.277.250	97,90%
XIV	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				112.000.000	112.000.000	100,00%
59	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	100%	112.000.000	112.000.000	100,00%
XVI	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan				1.025.000.000	1.025.000.000	100,00%
60	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 dok	1 dok	100%	1.025.000.000	1.025.000.000	100,00%



XVII	Pembinaan dan Pengembangan Olah raga Kreasi				466.938.250	433.277.250	92,79%
61	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Permasalahan Festival dan OlahragaRekreasi	1 dok	1 dok	100%	466.938.250	433.277.250	92,79%
F	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan				200.000.000	200.000.000	100,00%
XVIII	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				200.000.000	200.000.000	100,00%
62	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	200.000.000	200.000.000	100,00%
	TOTAL SKB DAN SMP				4.845.282.793	4.568.595.467	94,29%
	SKB				261.906.546	256.132.935	97,80%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				71.406.546	67.132.935	94,02%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.260.000	6.050.000	83,33%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	7.260.000	6.050.000	83,33%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				26.255.700	24.896.950	94,82%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	4.760.700	3.801.950	79,86%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	2.995.000	2.670.000	89,15%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	18.500.000	18.425.000	99,59%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				33.630.846	32.615.985	96,98%
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%	8.000.000	7.492.985	93,66%
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	25.630.846	25.123.000	98,02%
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.260.000	3.570.000	83,80%
7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	4.260.000	3.570.000	83,80%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				190.500.000	189.000.000	99,21%
VI	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				190.500.000	189.000.000	99,21%
8	Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	12 bulan	12 bulan	100%	190.500.000	189.000.000	99,21%
	SMP Negeri 1 Pariaman				573.170.000	541.667.500	94,50%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				28.970.000	22.467.500	77,55%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.050.000	8.050.000	100,00%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	8.050.000	8.050.000	100,00%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				17.420.000	10.917.500	62,67%
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	1.820.000	1.820.000	100,00%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	4.050.000	2.870.000	70,86%
4	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	1.500.000	1.500.000	100,00%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	10.050.000	4.727.500	47,04%
III	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.500.000	3.500.000	100,00%
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	3.500.000	3.500.000	100,00%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				544.200.000	519.200.000	95,41%
III	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				544.200.000	519.200.000	95,41%
7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 sekolah	1 sekolah	100%	544.200.000	519.200.000	95,41%
	SMP Negeri 2 Pariaman				701.532.000	667.053.500	95,09%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				31.932.000	22.473.000	70,38%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.050.000	8.050.000	100,00%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	8.050.000	8.050.000	100,00%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				23.882.000	14.423.000	60,39%
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	1.460.000	1.460.000	100,00%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	9.962.000	9.028.000	90,62%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	2.460.000	2.460.000	100,00%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	10.000.000	1.475.000	14,75%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				669.600.000	644.580.500	96,26%
III	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				669.600.000	644.580.500	96,26%
6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 sekolah	1 sekolah	100%	669.600.000	644.580.500	96,26%
	SMP Negeri 3 Pariaman				791.265.000	751.330.000	94,95%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				28.065.000	23.130.000	82,42%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.050.000	8.050.000	100,00%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	8.050.000	8.050.000	100,00%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				20.015.000	15.080.000	75,34%
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	1.950.000	1.500.000	76,92%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	4.990.000	4.800.000	96,19%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	2.500.000	1.980.000	79,20%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	10.575.000	6.800.000	64,30%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				763.200.000	728.200.000	95,41%
III	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				763.200.000	728.200.000	95,41%
6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 sekolah	1 sekolah	100%	763.200.000	728.200.000	95,41%
	SMP Negeri 4 Pariaman				511.188.500	455.431.100	89,09%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				30.888.500	14.302.000	46,30%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.390.000	8.041.000	52,25%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	15.390.000	8.041.000	52,25%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				11.998.500	6.261.000	52,18%
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	1.745.000	1.745.000	100,00%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	5.133.500	4.516.000	87,97%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	-	-	2.000.000	-	0,00%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	-	-	3.120.000	-	0,00%
III	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.500.000	-	0,00%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	-	-	3.500.000	-	0,00%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				480.300.000	441.129.100	91,84%
III	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				480.300.000	441.129.100	91,84%
7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 sekolah	1 sekolah	100%	480.300.000	441.129.100	91,84%
	SMP Negeri 5 Pariaman				347.042.245	341.747.080	98,47%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				21.442.245	16.147.080	75,30%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.050.000	7.050.000	100,00%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	7.050.000	7.050.000	100,00%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				14.392.245	9.097.080	63,21%
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	1.449.995	1.445.000	99,66%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	5.242.250	4.927.080	93,99%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	1.250.000	1.250.000	100,00%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	6.450.000	1.475.000	22,87%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				325.600.000	325.600.000	100,00%



V	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				325.600.000	325.600.000	100,00%
6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 6 Pariaman	1 sekolah	1 sekolah	100%	325.600.000	325.600.000	100,00%
					393.076.324	360.680.324	91,76%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				22.676.324	20.461.324	90,23%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.748.160	10.633.160	83,41%
1	PenyediaanAdministrasiPelaksanaanTugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	12.748.160	10.633.160	83,41%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.933.498	6.833.498	98,56%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	2.858.498	2.858.498	100,00%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	2.500.000	2.500.000	100,00%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	1.575.000	1.475.000	93,65%
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.994.666	2.994.666	100,00%
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	2.994.666	2.994.666	100,00%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				370.400.000	340.219.000	91,85%
IV	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				370.400.000	340.219.000	91,85%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 7 Pariaman	1 sekolah	1 sekolah	100%	370.400.000	340.219.000	91,85%
					578.535.500	549.168.400	94,92%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				45.335.500	40.968.400	90,37%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.047.500	7.050.000	87,60%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	8.047.500	7.050.000	87,60%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				17.729.758	15.754.658	88,86%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	6.431.758	6.431.658	100,00%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	5.898.000	5.898.000	100,00%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	5.400.000	3.425.000	63,43%
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.000.000	21.135.250	88,06%
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%	24.000.000	21.135.250	88,06%
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				2.920.000	2.920.000	100,00%
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	2.920.000	2.920.000	100,00%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				253.900.000	244.281.300	96,21%



V	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				253.900.000	244.281.300	96,21%
7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 9 Pariaman	1 sekolah	1 sekolah	100%	253.900.000	244.281.300	96,21%
					380.969.420	354.243.420	92,98%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.047.500	7.050.000	87,60%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	8.047.500	7.050.000	87,60%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				17.729.758	15.754.658	88,86%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	6.431.758	6.431.658	100,00%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	5.898.000	5.898.000	100,00%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	5.400.000	3.425.000	63,43%
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.000.000	21.135.250	88,06%
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%	24.000.000	21.135.250	88,06%
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				2.920.000	2.920.000	100,00%
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	2.920.000	2.920.000	100,00%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				253.900.000	244.281.300	96,21%



V	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				253.900.000	244.281.300	96,21%
7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 9 Pariaman	1 sekolah	1 sekolah	100%	253.900.000	244.281.300	96,21%
					380.969.420	354.243.420	92,98%
A	Program Penunjang UrusanPemerintah Daerah Kab/ Kota				29.269.420	27.543.420	94,10%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.050.000	7.050.000	100,00%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	7.050.000	7.050.000	100,00%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12.193.220	10.467.220	85,84%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	8.593.220	8.567.220	99,70%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	3.000.000	1.500.000	50,00%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	600.000	400.000	66,67%
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.026.200	5.026.200	100,00%
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	5.026.200	5.026.200	100,00%
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				5.000.000	5.000.000	100,00%
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	5.000.000	5.000.000	100,00%



B	Program Pengelolaan Pendidikan				351.700.000	326.700.000	92,89%
VI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				351.700.000	326.700.000	92,89%
7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 sekolah	1 sekolah	100%	351.700.000	326.700.000	92,89%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				45.335.500	40.968.400	90,37%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.050.000	8.050.000	100,00%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	8.050.000	8.050.000	100,00%
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit	1 unit	100%	4.000.000	4.000.000	100,00%
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 unit	1 unit	100%	3.000.000	200.000	6,67%
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	5.245.500	5.245.500	100,00%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	2.500.000	2.500.000	100,00%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	6.600.000	5.702.500	86,40%
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.000.000	12.330.400	94,85%
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%	13.000.000	12.330.400	94,85%
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				2.000.000	2.000.000	100,00%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	2.000.000	2.000.000	100,00%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				533.200.000	508.200.000	95,31%
V	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				533.200.000	508.200.000	95,31%
10	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 sekolah	1 sekolah	100%	533.200.000	508.200.000	95,31%
	SMP Negeri 8 Pariaman				306.597.258	291.141.208	94,96%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota				52.697.258	46.859.908	88,92%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.047.500	7.050.000	87,60%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	8.047.500	7.050.000	87,60%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				17.729.758	15.754.658	88,86%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	6.431.758	6.431.658	100,00%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	5.898.000	5.898.000	100,00%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	5.400.000	3.425.000	63,43%
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.000.000	21.135.250	88,06%
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%	24.000.000	21.135.250	88,06%



IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				2.920.000	2.920.000	100,00%
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	2.920.000	2.920.000	100,00%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				253.900.000	244.281.300	96,21%
V	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				253.900.000	244.281.300	96,21%
7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 9 Pariaman	1 sekolah	1 sekolah	100%	253.900.000	244.281.300	96,21%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				29.269.420	27.543.420	94,10%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.050.000	7.050.000	100,00%
1	PenyediaanAdministrasiPelaksanaanTugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	7.050.000	7.050.000	100,00%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12.193.220	10.467.220	85,84%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	8.593.220	8.567.220	99,70%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	3.000.000	1.500.000	50,00%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	600.000	400.000	66,67%
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.026.200	5.026.200	100,00%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	5.026.200	5.026.200	100,00%
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				5.000.000	5.000.000	100,00%
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	5.000.000	5.000.000	100,00%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				351.700.000	326.700.000	92,89%
VI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				351.700.000	326.700.000	92,89%
7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 sekolah	1 sekolah	100%	351.700.000	326.700.000	92,89%

B. KESEHATAN

Urusan Kesehatan diselenggarakan Oleh Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 137.847.308.627,28 dan realisasi anggaran sebesar Rp 130.503.276.786,00 (94,67%), dengan uraian berikut :

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Kebijakan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi (%)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar						98.305.956.740	93.788.144.536	95,40
Bidang Kesehatan						98.305.956.740	93.788.144.536	95,40
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota		Persentase terlayannya administrasi perkantoran				64.099.906.907	62.945.460.961	98,20



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8.993.250	6.425.000	71,44
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					63.085.191.993	62.032.734.684	98,33
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					63.085.191.993	62.032.734.684	98,33
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Mendapatkan Gaji Dan Tunjangan	DPA 2024	620 Orang	620 Orang	100%	62.945.763.993	61.893.306.684	98,33
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen penyedia Administrasi pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	DPA 2024	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	139.428.000	139.428.000	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah					170.320.816	168.665.955	99,03
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	DPA 2024	2 Paket	2 Paket	100%	5.005.000	5.005.000	100,00



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan kantor yang disediakan	DPA 2024	4 Paket	4 Paket	100%	69.849.000	68.500.000	98,07
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	DPA 2024	2 Paket	2 Paket	100%	22.563.816	22.563.816	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	DPA 2024	2 Paket	2 Paket	100%	10.000.000	10.000.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kooardinasi dan konsultasi SKPD	DPA 2024	12 Laporan	12 Laporan	100%	62.903.000	62.597.139	99,51
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						418.246.848	357.334.872	85,44
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	DPA 2024						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	DPA 2024	12 Laporan	12 Laporan	100%	154.200.000	94.126.320	61,04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	DPA 2024	12 Laporan	12 Laporan	100%	264.046.848	263.208.552	99,68



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan						417.154.000	380.300.450	91,17
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	DPA 2024	25 Unit	25 Unit	100%	217.154.000	180.400.450	83,07
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	DPA 2024	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan	DPA 2024	1 unit	1 unit	100%	200.000.000	199.900.000	99,95
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	DPA 2024	0	0	0	0	0	0
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pesentase Meningkatnya Upaya UKP dan UKM					33.113.758.583	30.059.840.587	90,78
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota					19.170.829.976	18.850.961.636	98,33



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 25 tahun 2023 tentang Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1 Unit	1 Unit	100%	15.653.800.594	15.374.137.399	98,21
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan sarana prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Kepmenkes 2015 tahun 2023 tentang Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer	1 Unit	1 Unit	100%	1.706.617.482	1.703.234.482	99,80
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat penunjang medic fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar		0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan rutin dan berkala Alkes/Alat Penunjang Medik Fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat penunjang medic fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Permenkes RI No. 54 Tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan	126 Item	126 Item	100%	49.470.000	49.228.500	99,51
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan	Perpres RI No.12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	187 Item	178 Item	100%	1.760.941.900	1.724.361.255	97,92



	Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan							
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota						13.925.327.807	11.208.878.951	80,49
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		726 Orang	0	0	-	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		726 Orang	0	0	-	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		608 Orang	0	0	-	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah bayi balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		640 Orang	0	0	-	0	0



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		5200 Orang	0	0	-	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		22.892 Orang	0	0	-	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		4.400 Orang	0	0	-	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		6.270 Orang	0	0	-	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		600 Orang			153.500.000	153.438.500	99,96



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar		80 Orang	0	0	-	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">• Permenkes 67 Tahun 2016• Perpres 67 Tahun 2021	905 Orang	905 Orang	100%	9.173.000	7.178.500	78,26
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan resikoTerinfeksi HIV	Jumlah orang yang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">• MDGs•Kepmenkes Nomor 23 tahun 2022 ttg Penanggulangan AIDS dan PIMS	1.188 Orang	1.188 Orang	100%	28.800.000	28.480.000	98,89
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	16.770.000	11.750.000	70,07



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	56.374.000	56.374.000	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		5 Dokumen	0	0	-	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023 Tentang Penyehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	232.855.000	232.855.000	100,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang germas	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	321.310.000	320.078.665	99,62
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisiona, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Tradisiona, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya		1 Dokumen	0	0	-	0	0



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	121.116.000	121.116.000	100,00
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan khusus		3 Dokumen	0	0	-	0	0
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil pelayanan kesehatan penyakit Menular dan Tidak Menular	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	543.884.716	494.536.890	90,93
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Perpres RI No.64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12.144.777.316	9.544.594.896	78,59



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

		Kesehatan						
Pengambilan dan pengiriman specimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah specimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan		150 Spesimen	15 Spesimen	10%	55.250.000	4.176.500	7,56
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-185 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	42.337.000	42.332.000	99,99
Operasional pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit		1 Dokumen	0	0	-	0	0
Operasional pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen operasional pelayanan Puskesmas		1 Dokumen	0	0	-	0	0
Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	13.005.000	13.005.000	100,00



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		1 Fasilitas	0	0	-	0	0
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan	1 Laporan	0	0	7.200.000	0	0
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public safety center (119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan RS dalam satu system penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Permenkes Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	100%	22.648.000	22.648.000	100,00
Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil Kewaspadaan dini dan Respon Wabah		1 Dokumen	0	0	-	0	0
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Permenkes No.22 Tahun 2022	1 Orang	1 Orang	100%	84.397.775	84.385.000	99,98



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

Pengelolaan upaya pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Permenkes Nomor 6 Tahun 2024	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	39.880.000	39.880.000	100,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Integrasi	Jumlah Dokumen Informasi Kesehatan secara Integrasi					17.600.800	0	0,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan system Informasi Kesehatan		1 Dokumen			17.600.800	0	0,00
Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					0	0	0,00
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan RS	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi, dan ditindaklanjuti perizinannya		1 Rumah	0	0	-	0	0
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional		56 Unit	0	0	-	0	0



	Mutu (INM) pelayanan kesehatan							
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar					605.330.250	355.007.258	58,65
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan		56 Unit	0	0	-	0	0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar					605.330.250	355.007.258	58,65
Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kab/kota	Jumlah Rekomendasi izin praktek tenaga kesehatan yang dikeluarkan					8.306.250	4.073.250	49,04



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	UU no.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Permenkes RI Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	8.306.250	4.073.250	49,04
Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan					64.310.000	62.150.000	96,64
Perencanaan dan Distribusi serta pemerataan SDM kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta pemerataan SDM kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Peraturan BAKN Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Kepegawaian Jabatan Fungsional Kesehatan.• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	64.310.000	62.150.000	96,64



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan Sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan Sesuai standar		1 Dokumen	0	0	-	0	0
Pembinaan dan pengawasan Sumber daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan pengawasan Sumber daya Manusia Kesehatan		1 Dokumen	0	0	-	0	0
Pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kab/ Kota						532.714.000	288.784.008	54,21
Pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kab/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah Kabupaten/ kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	Permendagri No.13 Tahun 2024 Tentang Posyandu • Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	620 Orang	620 Orang	100%	532.714.000	288.784.008	54,21
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makan Dan Minuman	Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					372.901.000	313.775.730	84,14



Pemberian izin apotek, Toko obat, toko alat kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah rekomendasi izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan, perizinan Apotek, Toko Obat, Toko alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan, perizinan Apotek, Toko Obat, Toko alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		1 Dokumen	0	0	-	0	0
Penerbitan sertifikat produksi pangan IRT dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah tangga	Jumlah sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang dikeluarkan					111.818.750	74.518.750	66,64
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan IRT dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Per BPOM No.11 tahun 2024 tentang Petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	111.818.750	74.518.750	66,64



makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah tangga	sertifikat produksi pangan IRT dan dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah tangga	non fisik bidang kesehatan menu kegiatan bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan tahun anggaran 2024							
Penerbitan sertifikat laik higienesantasi TPM dan DAM	Jumlah Rekomendasi sertifikat laik hygiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)			0	0	-	0	0	
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat lai higienes anitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antaera lain Jasa Boga, Rumah Makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan, perizinan Apotek, Toko Obat, Toko alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		7 Dokumen	0	0	-	0	0	



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makann minuman industri Rumah Tangga						261.082.250	239.256.980	91,64
Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk Dan Sarana Produksi Makan dan minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang dilakukan pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Per BPOM No.11 tahun 2024 tentang Petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan menu kegiatan bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan tahun anggaran 2024	75 Produk	75 Produk	100%	261.082.250	239.256.980	91,64
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					114.060.000	114.060.000	100,00
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manuasia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota						Rp 145,525,400	Rp 127,742,400	88%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

Peningkatan Upaya Promkes, Advokasi, Kemitraan, dan pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	34.800.000	34.800.000	100,00
Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Rumah Tangga PHBS							
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		4 Dokumen	0	0	-	0	0
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dibina					79.260.000	79.260.000	100,00
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Permendagri No.13 Tahun 2024 Tentang Posyandu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	79.260.000	79.260.000	100,00



C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 36.987.810.021,30 dan realisasi anggaran sebesar Rp 34.800.356.384,00 (94,09%), dengan uraian berikut :

No	Program/kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		72,50 %	100,00%	797.657.150	778.777.580	97,63%
1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	UU No 17 Tahun 2019	25,89 %	25,30 %	100,00%	291.465.650	285.257.850	97,87%
2	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota)	UU No 17 Tahun 2019	72,50 %	82,26 %	100,00%	506.191.500	493.519.730	97,50%
II	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		42,50%	42,50%	100,00%	1.716.635.200	1.694.157.590	98,69%
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten/Kota	UU No 17 Tahun 2019	42,50%	42,50%	100,00%	1.716.635.200	1.694.157.590	98,69%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

No	Program/kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	Program Penyelenggaraan Jalan		72,16%	63,61%	100,00%	14.880.398.159	14.688.699.475	98,71%
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan	72,16%	63,61%	100,00%	14.880.398.159	14.688.699.475	98,71%
IV	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		0%	0%	0,00%	4.900.000	4.900.000	100,00%
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	UU No.2 Tahun 2012 tentang Jakon	0%	0%	0,00%	4.900.000	4.900.000	100,00%
V	Program Penataan Bangunan Gedung		80,10%	80,10%	100,00%	3.098.697.686	2.363.210.334	76,26%
1	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	80,10%	80,10%	100,00%	3.098.697.686	2.363.210.334	76,26%
VI	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		7 Kawasan	2 Kawasan	100 %	181.408.400	179.474.000	98,93%
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota	UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	7 Kawasan	2 Kawasan	100 %	181.408.400	179.474.000	98,93%



No	Program/kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PP no.16 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung PP No.15 Tahun 2021 tentang arsitek						
VII	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		96,55 %	96,55 %	100,00%	896.394.000	878.811.890	98,04%
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota		96,55 %	96,55 %	100,00%	896.394.000	878.811.890	98,04%
VIII	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		71,53%	71,53%	100,00%	4.018.682.633	3.957.414.577	98,48%
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air		71,53%	71,53%	100,00%	4.018.682.633	3.957.414.577	98,48%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

No	Program/kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota							
IX	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		1 dok	0	0,00%	304.702.840	121.109.540	39,75%
1	Kegiatan Penetapan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	1 dok	0	0,00%	304.702.840	121.109.540	39,75%
X	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		5 Berita Acara	7 Berita Acara	100,00%	52.523.250	25.151.350	47,89%
1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960	5 Berita Acara	7 Berita Acara	100,00%	52.523.250	25.151.350	47,89%
XI	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah		81,93%	81,93%	100,00%	91.729.250	51.286.910	55,91%
1	Kegiatan Penerbitan Izin membuka Tanah	PP No. 18 Tahun 2021	81,93%	81,93%	100,00%	91.729.250	51.286.910	55,91%



D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.704.490.079,54 dan realisasi anggaran sebesar Rp 17.527.731.050,00 (93,71%), dengan uraian berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN							
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas OPD PerkimLH	100%	100,00 %	100,00	8.252.455.929,54	7.945.365.576	96,28
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	100%	100,00 %	100,00	30.260.000	30.257.000	99,99
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mengatur Pembayaran Gaji Asn Dan Cpns	100%	100,00 %	100,00	7.470.134.601,54	7.278.350.073	97,43



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Keperluan Administrasi Umum Perangkat Daerah Disperkim Lh	100%	100,00 %	100,00	241.008.100	230.675.100	95,71
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100%	100,00 %	100,00	301.545.228	233.793.024	77,53
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	100%	100,00 %	100,00	209.508.000	172.290.379	82,24
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam	100%	0%	0	97.735.000	82.626.600	84,54
		Jumlah Dokumen Pengembangan Perumahan	1 Dok	1 Dok	100			
1	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	100%	83.745.000	82.626.600	98,66
2	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang di Bangun dan di Rehabilitasi	1 Unit Rumah	0%	0,00	13.990.000	0	0,00



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
III	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	JUMLAH LUASAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG TERTANGANI	25,05 Ha	1,79 Ha	7,15%	4.073.356.400	3.914.322.520	96,10
		PERSENTASE PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI (PERSENTASE PERUMAHAN LAYAK HUNI)	92,53%	93,16 %	100,68%			
1	Kegiatan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan	1 Kwsn	1 Kwsn	100%	4.073.356.400	3.914.322.520	96,10
IV	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE PERUMAHAN YANG TELAH DILENGKAPI PRASARAN, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU) YANG DITINGKATKAN	25%	16,67 %	66,68%	4.353.456.750	4.183.191.610	96,09
1	Kegiatan Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan	Tercapainya Cakupan Infrastruktur Perumahan Yang baik dan aman yang di Dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	6 Lokasi	6 Lokasi	100%	4.353.456.750	4.183.191.610	96,09



E. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.854.481.351,42 dan realisasi anggaran sebesar Rp 17.152.334.258,00 (96,07%), dengan uraian berikut :

No	Program/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS SATPOL PP & DAMKAR								
I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota								
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	APBD & APBD PerubahanTahun 2023	1 tahun	1 tahun	100%	Rp 5.061.385.048,-	Rp 5.041.652.200,-	99,61%
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	APBD & APBD PerubahanTahun 2023	1 tahun	1 tahun	100%	Rp 170.983.300,-	Rp 165.842.009,-	96,99%
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APBD & APBD PerubahanTahun 2023	1 tahun	1 tahun	100%	Rp 134.643.600,-	Rp 76.959.636,-	57,16%
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APBD & APBD PerubahanTahun 2023	1 tahun	1 tahun	100%	Rp 202.699.100,-	Rp 155.946.100,-	76,93%
II Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	APBD & APBD PerubahanTahun 2023	1 tahun	1 tahun	100%	Rp 3.409.671.260,-	Rp 3.219.219.884,-	94,41%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	APBD & APBD Perubahan Tahun 2023	1 tahun	1 tahun	100%	Rp 54.345.000,-	Rp 34.370.000,-	63,24%
III	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran							
1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	APBD & APBD Perubahan Tahun 2023	1 tahun	1 tahun	100%	Rp 2.249.246.400,-	Rp 2.172.391.991,-	96,58%
2	Investigasi Kejadian Kebakaran	APBD & APBD Perubahan Tahun 2023	1 tahun	1 tahun	100%	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	100%
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	APBD & APBD Perubahan Tahun 2023	100%	100%	100%	Rp 6.450.000,-	Rp -	0%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah						Rp 5.523.770.467,-	Rp 5.230.306.704,-	94,69%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	100%	100%	100%	Rp 3.394.095.467,-	Rp 3.242.234.340,-	95,53%
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	7 laporan	7 laporan	100%	Rp 3.500.000,-	Rp 3.500.000,-	100%
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	1 tahun	1 tahun	100%	Rp 2.586.654.017,-	Rp 2.537.581.044,-	98,10%
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	1 tahun	1 tahun	100%	Rp 278.150.000,-	Rp 260.523.171,-	93,66%
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	1 unit	1 unit	100%	Rp 15.000.000,-	Rp 14.985.000,-	99,90%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

	Pemerintah Daerah							
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	1 tahun	1 tahun	100%	Rp 200.540.000,-	Rp 164.307.285,-	81,93%
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	5 jenis	5 jenis	100%	Rp 310.251.450,-	Rp 261.337.840,-	84,23%
II	Program Penanggulangan Bencana		100%	100%	100%	Rp 2.129.675.000,-	Rp 1.988.072.364,-	93,35%
a	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		50 orang	50 orang	100%	Rp 158.466.600,-	Rp 157.453.300,-	99,36%
b	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		930 orang	930 orang	100%	Rp 193.274.000,-	Rp 152.032.320,-	78,66%
c	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		2 kegiatan	2 kegiatan	100%	Rp 1.724.454.400,-	Rp 1.625.777.244,-	94,28%
d	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		1 dokume	1 dokumen	100%	Rp 53.480.000,-	Rp 52.809.500,-	98,75%

F. SOSIAL

Urusan Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Pariaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.886.670.225,12- dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.761.104.815,00 (96,77%), dengan uraian berikut :

No	Program/kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 tahun	1 tahun	100	Rp. 2.733.378.743,-	Rp. 2.577.892.009,-	94,31
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

1	Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	80 % (PPKS) 8 (Lembaga)	80 % (PPKS) 8 (Lembaga)	100	Rp. 152.158.150,-	Rp. 143.487.750,-	94,30
2	Pengembangan Kemampuan SDM Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3)	Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100 org/sertifikasi	100 org/sertifikasi	100	Rpo. 42.900.000,-	Rp. 39.900.000,-	93,00
II PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti	Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	100	Rp. 690.553,570,-	Rp. 667.388.322,-	96,64
2	Rehabilitasi Sosial dasar PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	100	Rp.35.545.400,-	Rp.35.462.000,-	99,76
III PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	55.000 DTKS	55.000 DTKS	100	Rp. 47.695.000,-	Rp. 45.695.000,-	95,80
2	Fasilitasi Bansos Keluarga	Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	100	Rp. 47.333.800,-	Rp. 42.421.852,-	89,62
IV PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
1	Perlindungan Sosial Korban	Perda No. 4 tahun	100 %	100 %	100	Rp. 61.623.500,-	Rp.	82,14



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

	Bencana alam dan sosial kabupaten/kota	2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial					50.622.250,-	
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	2 kpg/2 lumbung	2 kpg/2 lumbung	100%	Rp. 16.720.000,-	Rp. 12.000.000,-	71,77
3	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	25 org	25 org	100 %	Rp. 16.766.700,-	Rp. 16.720.000	99,72
V	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							
1	Pemeliharaan TMP Nasional Kabupaten/Kota	Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	87 makam	87 makam	100	Rp. 15.866.910,-	Rp. 15.849.750,-	99,87
2	Pengamanan TMP	Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	87 makam	87 makam	100	Rp. 23.982.520,-	Rp. 23.800.000,-	99,23



BAB III

HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. HASIL EPPD

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kota Pariaman mendapatkan skor **3,2982** dengan status “Sedang”.

B. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. Opini Atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain :

- a) Pengelolaan Retribusi Grosir dan Pertokoan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tidak Sesuai Ketentuan;



- b) Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Honorarium, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat tidak sesuai ketentuan dengan jumlah sebesar Rp 1.903.941.732,76 (Rp 1.337.778.000,00 + Rp 228.573.187,70 + Rp 246.918.653,00 + Rp 90.671.892,06); dan
- c) APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 mengalami Defisit Kas sehingga menimbulkan hutang yang harus segera dibayar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Pariaman antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk:
 - a. Menetapkan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran sewa kios dari penyewa pertama dan menagih minimal sebesar Rp 771.671.496,00 serta menyetorkan ke Kas Daerah.
 - b. Mengintruksikan kepala UPTD Pasar Pariaman untuk:
 - 1) Intensif melakukan pemungutan atas sewa kios yang telah disetor penyewa kedua kepada penyewa pertama minimal Rp 276.780.713,00 (Rp 174.518.213,00+Rp 102.262.500,00) dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
 - 2) Melakukan pemutakhiran perjanjian sewa menyewa setiap tahun.
2. Kepala OPD terkait temuan pada Akun Belanja Barang dan Jasa memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp 1.473.583.130,06 (Rp 1.225.960.931,00 + Rp 156.950.307,00 + Rp 90.671.892,06) dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
3. Sekretaris Daerah supaya:
 - a. Memproyeksikan jumlah pendapatan daerah yang realistis sesuai sumber pendapatan yang senyatanya; dan
 - b. Merumuskan langkah-langkah strategis mengatasi defisit keuangan diantaranya dengan melakukan rasionalisasi anggaran untuk kegiatan yang tidak mendesak dan tidak prioritas.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.



BAB IV

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD.

Penerimaan Pemerintah Daerah adalah hasil dari suatu perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu yang menyangkut seluruh penerimaan yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya.

Penerimaan pemerintah akan memberikan pandangan yang sangat membantu tentang bagaimana kebijakan-kebijakan yang berbeda yang mampu mengontrol pertumbuhan anggaran pemerintah dan konsekuensinya menghalangi tingkat defisit keuangan daerah. Penerimaan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah, selain jumlah penduduk juga mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah.

Selain penerimaan, seperti lazimnya sebuah organisasi, pemerintah melakukan banyak pengeluaran untuk membiayai kegiatan pembangunan. Pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari akan tetapi untuk membiayai kegiatan perekonomian, seperti menggerakkan dan merancang kegiatan ekonomi yang masyarakatnya atau kalangan swasta tidak tertarik untuk menjalankannya.

Pengeluaran pemerintah daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Berdasarkan kinerja dalam struktur anggaran daerah pengeluaran daerah dibagi menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran pemerintah yang konsumtif sebab pengeluaran ini manfaatnya hanya satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah asset atau kekayaan daerah, sedangkan pengeluaran



pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif karena pengeluaran ini digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif yang dapat menambah kekayaan daerah.

A. PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Pada tahun anggaran 2024, target pendapatan Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp669.473.661.957,00 dengan realisasi sebesar Rp644.362.029.673,36 atau sebesar 96,25%. Realisasi Pendapatan TA 2024 meningkat sebesar Rp18.532.946.203,32 atau 2,88% dari realisasi pendapatan TA 2023 sebesar Rp625.829.083.470,04. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan TA 2024 dan 2023 adalah:

Tabel 4.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%	2023
	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	669.473.661.957,00	644.362.029.673,36	96,25	625.829.083.470,04
PENDAPATAN ASLI DAERAH	53.788.984.257,00	45.911.378.642,36	85,35	38.861.600.702,04
Pendapatan Pajak Daerah	14.135.000.000,00	14.396.111.950,00	101,85	14.323.956.113,00
Pendapatan Retribusi Daerah	12.636.235.000,00	9.376.715.070,00	74,20	3.115.174.963,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.331.512.753,00	11.331.512.753,00	100,00	10.042.663.440,00
Lain-lain PAD yang sah	15.686.236.504,00	10.807.038.869,36	68,90	11.379.806.186,04
PENDAPATAN TRANSFER	615.684.677.700,00	598.450.651.031,00	97,20	580.803.758.528,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	527.380.968.000,00	523.642.264.998,00	99,29	505.788.526.492,00
Dana Bagi Hasil Pajak	4.780.810.000,00	6.320.110.669,00	132,20	6.516.066.396,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.977.692.000,00	5.977.692.000,00	100,00	7.422.153.000,00



Uraian	2024		%	2023
	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Dana Alokasi Umum	412.646.363.000,00	417.506.738.000,00	101,18	400.085.686.160,00
Dana Alokasi Khusus	103.976.103.000,00	93.837.724.329,00	90,25	91.764.620.936,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	41.844.428.000,00	41.844.428.000,00	100,00	47.385.758.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	6.012.923.000,00
Dana Desa	41.844.428.000,00	41.844.428.000,00	100,00	41.372.835.000,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	46.459.281.700,00	32.963.958.033,00	70,95	27.629.474.036,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	46.459.281.700,00	32.963.958.033,00	70,95	26.989.474.036,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	640.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	6.163.724.240,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	1.272.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	4.891.724.240,00

Penerimaan pembiayaan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp7.383.487.579,00 dan realisasinya sebesar Rp7.383.487.579,51 sebesar 100,00%. Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2024 merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai berikut:

Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Nilai (Rp)
1	2
➤ Kas Umum Daerah Kota Pariaman	5.184.423.125,13
➤ Kas di BLUD	1.163.925.554,00
➤ Kas di Bendahara BOS	122.385,00



➤ Kas Dana Kapitasi pada FKTP	42.669.245,38
➤ Kas Dana BOK Puskesmas	992.347.270,00
Jumlah	7.383.487.579,51

B. PENGELUARAN DAERAH

Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

TA 2024 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Hibah
 - d. Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya
3. Belanja Tak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Transfer Bagi hasil Pendapatan
 - b. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Pemerintah Kota Pariaman TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp648.100.984.541,33 dan Rp619.164.014.291,00. Realisasi Belanja TA 2024 meningkat sebesar Rp28.936.970.250,00 atau 4,67% dari Belanja TA 2023. Rincian Belanja adalah:



4.2 Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

No.	Jenis Belanja Daerah	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Operasi	520.018.545.721,88	501.221.378.133,33	96,39	467.268.136.266,00
2	Belanja Modal	64.737.258.930,00	58.767.684.209,00	90,78	63.803.160.485,00
3	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	120.495.000,00	24,10	0,00
4	Belanja Transfer	90.601.344.884,12	87.991.427.199,00	97,12	88.092.717.540,00
Jumlah		675.857.149.536,00	648.100.984.541,33	95,89	619.164.014.291,00

Pengeluaran pembiayaan TA 2024 dianggarkan Rp1.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal kepada PT Bank Nagari dengan SP2D Nomor 13.77/04.0/000001/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/11/2024 tanggal 06 November 2024 tentang Penyaluran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada PT. Bank Nagari Cabang Pariaman Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 dan Persetujuan Walikota Pariaman tanggal 26 Oktober 2024.

Dalam hal ini, Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.3 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran TA 2024

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	Pendapatan	644.362.029.673,36	
2.	Belanja		648.100.984.541,33
3.	Penerimaan Pembiayaan	7.383.487.579,51	
4.	Pengeluaran Pembiayaan		1.000.000.000,00
Jumlah		651.745.517.252,87	649.100.984.541,33

Berdasarkan tabel diatas, disimpulkan bahwa pada Akhir Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kota Pariaman memiliki jumlah SiLPA akhir TA 2024 (per 31 Desember 2024) sebesar Rp2.644.532.711,54 mengalami penurunan sebesar (Rp4.738.954.867,97) atau 64,18% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp7.383.487.579,51.



BAB V

INOVASI DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 386 ayat (2) menyatakan bahwa Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 388 ayat (7), (9), (10) dan (11) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah melaporkan Inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri dan Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pasal 4 menyatakan bahwa Inovasi daerah berbentuk :

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 6 menyatakan bahwa Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.



Tabel 5.1 Inovasi Daerah Tahun 2024

No.	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	OPD
1	ESDM Versi 3 (Elektronik Sumber Daya Manusia Versi 3)	Inovasi pelayanan publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM Kota Pariaman)
2	SIBAT Kota Pariaman (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Kota Pariaman)
3	BALADA (Barcode Label Aset Daerah) Kota Pariaman	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD Kota Pariaman)
4	Kipang "O" (Klinik Pengadaan Barang/Jasa Online)	Inovasi pelayanan publik	Bagian Administrasi Pembangunan (Bagian Administrasi Pembangunan- Sekretariat Daerah)
5	PARIAMAN UNGGUL PRODUKTIF TERINTEGRASI	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	BAPPEDA Kota Pariaman
6	MUSRENBANG TERINTEGRASI	Inovasi pelayanan publik	BAPPEDA Kota Pariaman
7	RANCAK (Rekap Analisis Catatan Kependudukan)	Inovasi pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil Kota Pariaman)
8	Rumah Data Desa Statistik	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo Kota Pariaman)
9	Podcast IKP (Informasi Kominfo Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo Kota Pariaman)
10	SIPEKAD (Sistem Informasi Absensi Perangkat Desa)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo Kota Pariaman)
11	Tourism Promotion Warrior	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud Kota Pariaman)
12	Visit Destinasi Plus	Inovasi pelayanan publik	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud Kota Pariaman)
13	Silada PH Dipa (Sistem Pelayanan Data Pengunjung Hotel Dinas Pariwisata)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud Kota Pariaman)



14	GERAKAN SATU JAM MENYAPU DESTINASI WISATA (GSM DEWI)	Inovasi pelayanan publik	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud Kota Pariaman)
15	NASI SALA (layaNAn konsultaSI permaSALahan tAnah)	Inovasi pelayanan publik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP Kota Pariaman)
16	Sistem Informasi dan Layanan Bangunan Air dan DrAinase (SALA BADA)	Inovasi pelayanan publik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP Kota Pariaman)
17	ALAT PUPUK JAGUNG PRAKTIS	Inovasi pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD Kota Pariaman)
18	Alat Pengusir Burung Otomatis	Inovasi pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD Kota Pariaman)
19	PUspaga TeRIntegrasi melalui Edukasi terhadap ragam Masalah Anak Sekolah (Putri Emas)	Inovasi pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB Kota Pariaman)
20	KOPI (Kartu Informasi Potensi Investasi)	Inovasi pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker Kota Pariaman)
21	LAPAU BOSS TEMATIK (Layanan Perizinan Berusaha Bisa OSS Tematik)	Inovasi pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker Kota Pariaman)
22	KLIK HI MOBILE (Klinik Konsultasi Hubungan Industrial Mobile)	Inovasi pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker Kota Pariaman)
23	SEKOLAH DIBALIK JERUJI EMAS (EDUKASI MASYARAKAT)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora Kota Pariaman)
24	BUMS (BEASISWA UNGGULAN MINANG SMART)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora Kota Pariaman)
25	Lalu Lintas Pantau Langsung Dari Handphone (LALAPAN LAHAP)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Dinas Perhubungan (Dishub Kota Pariaman)



26	SISTEM LAYANAN PENGADUAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Dinas Perhubungan (Dishub Kota Pariaman)
27	KORSI BERAD 0% (Koperasi Berantas Rentenir dan Lintah Darat Dengan Bunga 0%)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM (Disperindagkop ukm Kota Pariaman)
28	LAPAK OPD (Layanan Pengelolaan Kearsipan OPD)	Inovasi pelayanan publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip Kota Pariaman)
29	Klinik Sultan (Klinik Konsultasi Keuangan)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman (DP3 Kota Pariaman)
30	SLADA (Slip Gaji Digital)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman (DP3 Kota Pariaman)
31	SILASIH (SISTEM INFORMASI PELANGGAN AIR BERSIH)	Inovasi pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkimlh Kota Pariaman)
32	Bank Darah Pol PP Damkar	Inovasi pelayanan publik	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan PemadamKebakaran (Dinas Satpol pp damkar Kota Pariaman)
33	SAUS VEDAS (Standar Usulan Verifikasi dan Validasi Data Sosial)	Inovasi pelayanan publik	Dinas Sosial Kota Pariaman (Dinsos Kota Pariaman)
34	BIMOSIGAKIN PLUS (Bimbingan Motivasi Berprestasi Bagi Siswa Miskin Plus)	Inovasi pelayanan publik	Dinas Sosial Kota Pariaman (Dinsos Kota Pariaman)
35	KUPAS DURIAN VERSI II (KONSULTASI, PENGAWASAN, PENGADUAN DAN SARAN VERSI II)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Inspektorat Kota Pariaman
36	"DIGIMONS" (DIGITALISASI MONITORING DAN EVALUASI SAKIP)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Inspektorat Kota Pariaman



37	E-BOOK PEDOMAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN (E-BOOK PAK RT)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Inspektorat Kota Pariaman
38	KADER SABANA PKK (KADER SADAR BELA NEGARA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Kantor Kesbangpol Kota Pariaman
39	ManDaKeK (Manfaat Dasawisma untuk Kesejahteraan Keluarga)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Kecamatan Pariaman Selatan
40	Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (SPPKD)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Kecamatan Pariaman Timur
41	LaDO (Laporan Online Dubalang)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Kecamatan Pariaman Utara
42	INFO PARLEMEN	Inovasi pelayanan publik	Sekretariat DPRD Kota Pariaman
43	YANTI BERSATU (Layanan Terpadu Tuberkulosis Satu Pintu)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	UPT Puskesmas Air Santok - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)
44	SILIK MANTIK (Si Cilik Pemantau Jentik)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	UPT Puskesmas Air Santok - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)
45	KELUARGA KOE (KELOLA OBAT KADALUWARSA DI RUMAH TANGGA DENGAN KOTAK OBAT EXPIRED)	Inovasi pelayanan publik	UPT Puskesmas Kampung Baru Padusunan - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)
46	GEMESIN (GIRING DAN EDUKASI MAMA MUDA AGAR SADAR AKAN PENTINGNYA IMUNISASI PADA ANAK)	Inovasi pelayanan publik	UPT Puskesmas Kampung Baru Padusunan - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)
47	JEDAH TASBIH (JEMPUT DAHAK TB HC KURAI TAJI)	Inovasi pelayanan publik	UPT Puskesmas Kurai Taji - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)



48	BUSER PUJI (BULETIN SURVEILANS PUSKESMAS KURAI TAJI)	Inovasi pelayanan publik	UPT Puskesmas Kurai Taji - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)
49	SAKINAH FORTE (STOP KEMATIAN IBU HAMIL DAN ANAK HINDARI 4 TERLALU 3 TERLAMBAT)	Inovasi pelayanan publik	UPT Puskesmas Kurai Taji - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)
50	KUE CINTA MAS AJI (KONSULTASI EDUKASI CALON PENGANTIN TERINTEGRASI PUSKESMAS KURAI TAJI)	Inovasi pelayanan publik	UPT Puskesmas Kurai Taji - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)
51	DEBATIK (DESA BEBAS JENTIK)	Inovasi pelayanan publik	UPT Puskesmas Kurai Taji - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)
52	SIBEROT (Sikat gigi BERSama Orang Tua)	Inovasi pelayanan publik	UPT Puskesmas Marunggi - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)
53	SELYANG (Sentral Layanan pengaduan dan Aspirasi masyarakat puskesmas marunggi)	Inovasi pelayanan publik	UPT Puskesmas Marunggi - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)
54	JUMANJI (Juru peMANTau kesehatan Jiwa)	Inovasi pelayanan publik	UPT Puskesmas Marunggi - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)
55	Stiker Cinta	Inovasi pelayanan publik	UPT Puskesmas Marunggi - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)
56	GANG GENIT (pereGANGan tiga mENIT)	Inovasi pelayanan publik	UPT Puskesmas Marunggi - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)
57	PALAI CUMI MANTAB (PEMERIKSAAN KEHAMILAN DIDAMPINGI SUAMI DAN PEMANTAUAN MINUM TABLET TAMBAH DARAH)	Inovasi pelayanan publik	UPT Puskesmas Naras - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)
58	SIKAD (SISTEM KEGAWATDARURATAN DINI)	Inovasi pelayanan publik	UPT Puskesmas Pariaman -Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)
59	SILANSA (SISTEM INFORMASI LANSIA SEHAT)	Inovasi pelayanan publik	UPT Puskesmas Sikapak - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)
60	si BIKA MASAK BAKA (SISTEM INFORMASI BULETIN KESEHATAN PUSKESMAS SIKAPAK BAGI	Inovasi pelayanan publik	UPT Puskesmas Sikapak - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)



	MASYARAKAT LUAS)		
61	DEMI BESTI (DiabEtes Melltus, mari BErSama kita aTasl)	Inovasi pelayanan publik	UPT RS.Sadikin - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)
62	IBU MUDA (Inovasi BUku taMU DigitAl)	Inovasi pelayanan publik	UPT RS.Sadikin - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)
63	OPIUM (Optimalisasi Pelayanan Informasi obat melalUi Media whatsapp Messenger)	Inovasi pelayanan publik	UPT RS.Sadikin - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)
64	PEDANG RS (Pengumpulan DAta INM (Indikator Nasional Mutu) diGital Rumah Sakit)	Inovasi pelayanan publik	UPT RS.Sadikin - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman)



BAB VI PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) berisikan antara lain : capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil EPPD, Opini atas Laporan Keuangan Daerah tahun sebelumnya, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah serta Inovasi Daerah.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan berbagai urusan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan penerapan Otonomi Daerah. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja makro dimana perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pariaman mengalami sedikit peningkatan sebesar 80,49 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 79,76. Angka kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 4,26 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,20 persen. Angka pengangguran mengalami penurunan dari 5,68 persen menjadi 5,32 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman mengalami percepatan dengan tumbuh sebesar 4,51 persen. Sementara Pendapatan per kapita Kota Pariaman meningkat mencapai 69,17 juta rupiah/jiwa. Akan tetapi, ketimpangan pendapatan Kota Pariaman tergolong ketimpangan rendah dengan nilai tercatat 0,281.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, merupakan upaya dari pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang berlandaskan kepada visi Kota Pariaman yaitu "*Pariaman Kota Tujuan Wisata Budaya yang Islami*" yang dijabarkan ke dalam misi Pembangunan Daerah. Kebijakan Pemerintah Kota Pariaman diperlukan sebagai jembatan yang menghubungkan antara Visi dan Misi dengan strategi yang ditetapkan. Strategi Pemerintahan Kota Pariaman merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan maupun sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Program tersebut merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.



Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kota Pariaman mendapatkan skor **3,2982** dengan status “Sedang”. Sedangkan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman terhadap Laporan Keuangan Kota Pariaman Tahun 2023 dengan penyajian “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

Dalam menentukan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan di Kota Pariaman, perlu ditinjau sumber-sumber penerimaan daerah yang menjadi kriteria penting dalam mengalokasikan belanja, menentukan strategi dan prioritas anggaran. Pada Tahun 2024 target dari pendapatan Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp669.473.661.957,00 dengan realisasi sebesar Rp644.362.029.673,36 atau sebesar 96,25%. Untuk belanja daerah pada APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 675.857.149.536,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 648.100.984.541,33 atau sebesar 95,89%. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Pariaman memiliki 64 inovasi daerah pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kemendagri.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 ini dibuat dan diharapkan informasi ini dapat menjadi masukan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.